

**IMPLEMENTASI PERDA NO 7 TAHUN 2010
TENTANG PAJAK DAERAH DALAM MENUNJANG
OTONOMI DAERAH DI KOTA TANGERANG SELATAN**

**TESIS
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat S-2**

**Program Pascasarjana Universitas Indonusa Esa Unggul
Program Studi : Magister Ilmu Hukum**



**Diajukan oleh :
SUGENG SANTOSO
09090909**

Kepada

**PROGAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS INDONUSA ESA UNGGUL JAKARTA
2012**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Jakarta, September 2012

Penulis

**IMPLEMENTASI PERDA NO 7 TAHUN 2010
TENTANG PAJAK DAERAH DALAM MENUNJANG
OTONOMI DAERAH DI KOTA TANGERANG SELATAN**

Dipersiapkan dan disusun oleh :
SUGENG SANTOSO
0909090909

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal : 1 September 2012

Susunan Tim Penguji

Ketua Penguji,

Anggota Tim Penguji Lain

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sekretaris Penguji

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister Hukum

Tanggal : September 2012
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Indonusa Esa Unggul
Jakarta

Prof. H.A.S. Natabaya, SH, MH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Sejujurnya penulis akui bahwa kesulitan selalu ada di setiap proses pembuatan Tesis ini, tetapi faktor kesulitan itu lebih banyak datang dari diri sendiri. Kesulitan itu akan terasa lebih mudah apabila kita yakin terhadap kemampuan yang kita miliki dan percaya bahwa Allah Swt. selalu menyertai hingga terselesaikannya Tesis ini.

Semua proses kemudahan dan kelancaran pada saat pembuatan Tesis ini tidak lepas dari segala bantuan dari berbagai pihak yang sengaja maupun yang tidak sengaja telah memberikan perhatian dan sumbangsuhnya. Maka penulis “wajib” mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau yang disebut sebagai berikut :

1. Bapak Ir. Alirahman, M.Sc, Ph.D, Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul Jakarta.
2. Bapak Prof. H.A.S. Natabaya, SH, MH, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Pembimbing Tesis ini.
3. Bapak Drs. H. Uus Kusnadi, M.Si, Kepala DPPKAD
4. Ibu Hj. Airin Rachmi Diany, SH, MH, Walikota Tangerang Selatan.
5. Bapak Ir. H. Bambang A. Rachmadi, MH, Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmunya
7. Harwati, SE, Istri tercinta dan Alifviasari Puspa Bangsa serta Ratu Azzahra, anak-anak terkasih belahan jiwa.

Penulis menyadari masih banyak sekali kekurangan-kekurangan dalam penyusunan Tesis penelitian ini. Maka penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Terima kasih.

Penulis, September 2012
Sugeng Santoso

ABSTRACT

SUGENG SANTOSO. Implementation of Local Regulations Number 7 of 2010 on Local Taxes in Supporting Regional Autonomy In South Tangerang City

Regional tax is one important source of revenue to fund the implementation of regional government to establish a broad regional autonomy, real and responsible.

Tax role in supporting the development of regional autonomy is seen in every project of the government has always touted that the project is constructed were funded by taxes collected from the community.

Thus it is important discussion about how the role of regional taxes in support of regional autonomy, especially in South Tangerang, Banten Province .

This thesis attempts to answer the above problems through empirical methods to examine the normative approach of synchronization and consistency of regulations on regional taxation (Act, Rules and Regulations Regional Government),

Further constraints faced by the regional tax collection, as well as the role of regional tax themselves to the implementation of development in the region in support of regional autonomy.

For the Government of South Tangerang City needs to revise the Regulation on Regional taxes, so this will affect the increased revenue derived from regional tax sector in the implementation of regional autonomy.

Key words: Regional Taxes, Regional Development, Regional Autonomy

ABSTRAK

SUGENG SANTOSO. IMPLEMENTASI PERDA NO 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH DALAM MENUNJANG OTONOMI DAERAH DI KOTA TANGERANG SELATAN

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Peran pajak dalam pembangunan dalam menunjang otonomi daerah terlihat dalam setiap proyek yang dilaksanakan pemerintah selalu di dengungkan bahwa proyek yang dibangun dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat.

Dengan demikian perlu kiranya dibahas mengenai bagaimana peran pajak daerah dalam menunjang otonomi daerah, khususnya di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten..

Tesis ini mencoba menjawab permasalahan di atas melalui metode pendekatan normatif empiris dengan meneliti mengenai sinkronisasi dan konsistensi peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah),

Selanjutnya kendala-kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak daerah, serta peran pajak daerah itu sendiri terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah dalam menunjang otonomi daerah.

Untuk itu Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan perlu melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, sehingga hal ini akan berdampak meningkatnya pendapatan asli daerah yang bersumber dari sektor pajak daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Kata kunci : Pajak Daerah, Pembangunan Daerah, Otonomi Daerah.

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN TESIS | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| ABSTRACT | v |
| ABSTRAK | vi |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR GAMBAR | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| | |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 7 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.4 Kegunaan Penelitian | 7 |
| 1.5 Sistematika Penulisan. | 8 |
| | |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| 2.1 Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah | 10 |
| 2.2 Pemahaman Kebijakan Pajak Daerah dalam Kebijakan Desentralisasi Fiskal | 12 |
| 2.3 Pengertian Pajak | 14 |
| 2.4 Pendekatan Terhadap Pajak | 17 |
| 2.5 Fungsi dan Azas-azas Pajak..... | 19 |
| 2.6 Asas dan Teori Pemungutan Pajak | 20 |
| 2.7 Pajak Daerah | 27 |
| 2.8 Fungsi Pajak Daerah | 29 |
| 2.9 Pemahaman Tentang Otonomi Daerah | 31 |
| 2.10 Pemahaman Tentang Kewenangan Daerah | 35 |
| 2.11 Pemahaman Tentang Pemencaran Kewenangan | 41 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | 45 |
| 3.1 Kerangka Penelitian | 45 |
| 3.2 Metode Penelitian | 51 |
| 3.2.1 Obyek Penelitian | 50 |
| 3.2.2 Bentuk dan Pendekatan Penelitian | 53 |
| 3.2.3 Penentuan Sampel | 53 |
| 3.2.4 Sumber Data Penelitian | 54 |
| 3.3 Teknik Pengumpulan Data | 55 |
| 3.4 Definisi Operasional | 55 |
| 3.5 Teknik Analisa Data | 61 |
| | |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 64 |
| 4.1 Gambaran Umum Kota Tangerang Selatan | 64 |
| 4.2 Penerapan asas-asas pembuatan peraturan daerah dalam | |

| | |
|---|-----|
| menunjang pelaksanaan otonomi daerah di Kota Tangerang Selatan | 66 |
| 4.3 Pelaksanaan Pemungutan Pajak di Kota Tangerang Selatan | 84 |
| 4.3.1 Peraturan-peraturan yang melandasi Pajak Daerah | 84 |
| 4.3.2 Pemungutan pajak berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2010 di Kota Tangerang Selatan | 89 |
| 4.3.3 Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah | 89 |
| 4.4 Realisasi Pajak | 96 |
| 4.4.1 Hasil Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Tangerang Selatan | 96 |
| 4.5 Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah di Kota Tangerang Selatan | 100 |
| 4.6 Peranan Pajak Daerah Dalam Menunjang Otonomi Daerah | 104 |
| 4.7 Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah | 114 |
| 4.8. Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD | 126 |
| 4.9 Objek Pajak terhadap Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2010 dan 2011 | 127 |
| BAB V PENUTUP | 128 |
| 5.1 Kesimpulan | 128 |
| 5.2 Saran-Saran | 130 |
| DAFTAR PUSTAKA | 134 |
| LAMPIRAN | 136 |

DAFTAR TABEL

| TABEL | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 | 96 |
| Tabel 2. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 | 97 |
| Tabel 3. Hubungan Teori dan Analisis Penelitian Untuk Permasalahan Nomor 1 | 102 |
| Tabel 4. Hubungan Teori Dan Analisis Penelitian Mengenai Permasalahan Nomor 2 | 113 |
| Tabel 5. Matriks SWOT | 116 |
| Tabel 6. Ide-ide strategi | 119 |
| Tabel 7. Hubungan Teori dan Analisis Penelitian Untuk Permasalahan Nomor 3 | 122 |
| Tabel 8. Komposisi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 dan 2011 | 126 |

DAFTAR GAMBAR

| GAMBAR | Halaman |
|---|---------|
| Gambar 3.1. Kerangka Pikir Penelitian | 51 |
| Gambar 4.1. Proses Fungsi Legislasi | 76 |
| Gambar 4.2. Tata cara pembahasan Raperda atas Prakarsa DPRD | 77 |
| Gambar 4.3. Tata cara pembahasan Raperda atas Prakarsa Pemda | 78 |
| Gambar 4.4. Sistem dan Prosedur Pajak Official Assesment | 91 |
| Gambar 4.5. Potensi Daerah, Penggalan PAD dan Peningkatan Pembangunan Daerah | 105 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | | |
|-------------|---|-----|
| Lampiran 1. | Pertanyaan Wawancara Kepada Kepala DPPKAD | 136 |
| Lampiran 2. | Daftar Pertanyaan Wawancara Pemilik atau Pengelola Rumah Makan atau Restoran | 137 |
| Lampiran 3. | Daftar Wajib Pajak Restoran s.d Bulan Juli 2012 | 142 |